



SIARAN PERS
HASIL SIDANG UMUM KE-5
THE INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS' ASSOCIATION
FOR INFORMATION TECHNOLOGY (IPAIT),
HELSINKI, FINLANDIA, 14 – 17 JANUARI 2007

Peningkatan peran *Information Society* dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi, pendidikan dan kesehatan merupakan suatu hal yang signifikan. Pendekatan hak asasi manusia terhadap *Information Society* bermaksud mencari kesetaraan di antara masyarakat dan individu khususnya bagi mereka yang kurang beruntung, rentan dan secara sosial tersingkirkan, melalui penegakan prinsip-prinsip non-diskriminasi, partisipasi dan pertanggungjawaban. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan sendirinya dapat mendukung upaya proses demokratisasi karena teknologi informasi dan komunikasi diyakini dapat mendekatkan para pemimpin negara dengan rakyatnya. Dalam konteks kerja parlemen, kemajuan teknologi ini mensinergikan kerja setiap anggota parlemen dengan aspirasi konstituennya yang selanjutnya diharapkan akan dapat menghasilkan *output* kerja anggota parlemen yang lebih berkualitas baik bagi konstituen maupun negaranya. Hal ini disampaikan oleh H.Andi M Ghalib, SH.,MH selaku salah satu panelis dalam panel diskusi bertema "*Democracy and Civil Rights in the Information Technology*" yang merupakan salah satu panel diskusi yang diadakan dalam Sidang Umum ke-5 *the International Parliamentarians' Association for Information Technology (IPAIT)*.

Sidang Umum yang berlangsung di Helsinki, Finlandia pada 14 – 17 Januari 2007 ini bertemakan "*Human Competency Development in the Information Society*" dihadiri oleh 135 anggota delegasi dari 39 negara yang terdiri dari 25 negara anggota ditambah 14 negara dengan status peninjau, termasuk Indonesia. Pada Sidang Umum kali ini delegasi DPR-RI dipimpin oleh H.Andi M. Ghalib, SH.,MH serta didampingi oleh Dra.Hj.Maryamah Nugraha Besoes, Andreas H. Pareira dan Ir.Trisanti Mitayani, MT.

Partisipasi delegasi DPR-RI pada IPAIT ke-5 ini merupakan kali pertama dan masih berstatus peninjau, namun demikian merupakan suatu kebanggaan dimana delegasi DPR-RI dipercaya untuk menjadi salah satu panelis dalam diskusi panel mengenai demokrasi dan hak sipil dalam teknologi informasi.

IPAIT ke-5 telah menghasilkan Deklarasi Helsinki yang menyerukan kerjasama bilateral dan multilateral diantara anggota IPAIT yang bertujuan untuk mempersempit *digital gap* diantara mereka. Selanjutnya negara-negara anggota IPAIT melalui Deklarasi Helsinki juga menyatakan kesungguhan untuk menyediakan seluruh warga negara mereka kemudahan penggunaan *Information and Communication Technology* (ICT) tanpa memandang status sosial, jender dan etnisitas serta menggaris bawahi pentingnya dukungan ICT terhadap negara berkembang baik dari segi ekonomi, teknologi maupun informasi.

Jakarta, 18 Januari 2007